

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mulai pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Tim Koordinasi PNPM MPd (2008).

PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini berhasil di laksanakan. Keberhasilan PPK tersebut adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi, dan efektivitas kegiatan dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program

pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Di dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa Pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi PNPM MPd (2008)

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd yang disusun oleh Tim Koordinasi PNPM (2008), Tujuan PNPM-MPd secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sedangkan tujuan PNPM-MPd secara khusus yaitu:

1. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian pembangunan.
2. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
3. mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
4. menyediakan sarana prasarana dasar sosial dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
5. melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan
7. mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sebagai keluaran atau *output* yang diharapkan pada Program PNPM-MPd yaitu:

1. terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian

2. terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
3. terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
4. berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM-MPd bagi masyarakat
5. terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap rumah tangga miskin
6. terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa dalam pengelolaan pembangunan.
7. terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Adapun Prinsip PNPM-Mpd yaitu:

1. bertumpu pada pembangunan manusia
2. otonomi
3. desentralisasi
4. berorientasi pada masyarakat miskin
5. partisipasi
6. kesetaraan dan keadilan gender
7. demokratis
8. transparansi dan akuntabel

9. prioritas

10. keberlanjutan

Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu yang menjadi target dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan, kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

2.1.2 Pengertian Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP)

Menurut Tim Koordinasi PNPM MPd pada buku penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (2008) SPP adalah program pinjaman dana bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Pinjaman tersebut pelaksanaannya lebih difokuskan untuk perempuan, hal ini dikarenakan pemanfaatannya lebih menekankan pada adanya partisipasi perempuan terutama dalam pengelolaan dana.

Terdapat dua macam pengelolaan dana bergulir yang dipegang UPK, yaitu SPP Program dan SPP Perguliran. SPP Program, merupakan simpan pinjam perempuan yang pengajuan amrahannya dikoordinir oleh desa dan pencairan dananya berbarengan dengan pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM). Sedangkan SPP

Perguliran, merupakan simpan pinjam kelompok perempuan yang pengajuan amprahannya dilakukan sendiri oleh kelompok dengan tetap berkoordinasi dan minta persetujuan dari pelaku PNPM-MPd yang ada di Kecamatan. Namun sejak tidak diberikannya lagi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh Pemerintah pada akhir tahun 2014, PNPM MPd Kecamatan Mayong hanya memberlakukan SPP Perguliran saja.

Kegiatan pengelolaan dana bergulir SPP PNPM-MPd bertujuan:

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan
4. Menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan
5. Peningkatan pelayanan kepada rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat

UPK juga sangat berperan penting di sini karena yang mengelola kegiatan program adalah UPK. Pengertian UPK menurut Petunjuk Teknis Operasional bahwa UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang

mengelola dana bantuan masyarakat, baik dari program pengembangan kecamatan maupun PNPM-MPd yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, UEP dan SPP / dana bergulir. Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. UPK mendapatkan penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

Tugas dan tanggung jawab umum UPK:

1. mengelola dana PNPM-MPd di Kecamatan
2. mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PPK maupun PNPM-MPd
3. mengelola dokumen-dokumen PNPM-MPd
4. mengelola dana bergulir dan BLM yang dialokasikan untuk UEP dan atau SPP, maupun dari sumber lain dari program pemerintah dan swasta
5. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok peminjam.

2.1.3 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (2007), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005) berpendapat dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Efektivitas memiliki tiga tingkatan, antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu di dasarkan pada pandangan dari segi individu yang menel an pada hasil karya karyawan atau anggota organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas Individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Gibson, Ivancevich dan Donaelly (2003) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Dari beberapa penjelasan diatas jelas bahwa pentingnya mengetahui efektifitas suatu organisasi pada skala lokal seperti kegiatan kelompok SPP pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

2.1.4 Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Apabila diurutkan pada urutan kegiatan, maka perencanaan merupakan awal dari rentetan urutan kegiatan. Fungsi yang lain akan bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi (program), taktik (cara melaksanakan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Pengertian perencanaan Menurut Cunningham yang dikutip dari penelitian Fitra, Benny (2010) adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, imajinasi, fakta dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan tersebut, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan dalam hal ini menekankan pada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Apakah wujud yang akan datang itu dan bagaimana usaha untuk mencapainya merupakan perencanaan.

Masih dalam kutipan Fitra Benny, pengertian perencanaan menurut Arthur W. Steller mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*), dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian atau berhubungan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber

Menurut Sondang P. Siagian (2014), mengemukakan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan

Menurut Tim Koordinasi PNPM MPd (2008) hal tersebut sejalan dengan tujuan umum dari PNPM MPd tersebut, perencanaan yang menjadi tujuan program dana bergulir adalah :

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan

5. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Misin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Menurut Rusiana Maharani Dewi, N. Eva Fauziah, Nurdin (2014) Universitas Islam Bandung, dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana SPP Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam Di UPK PNPM-MPd Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, maka beberapa indikator yang dapat diambil sebagai referensi untuk variabel perencanaan dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya sosialisasi program SPP
2. Adanya verifikasi nasabah
3. Ketepatan sasaran pemanfaat/nasabah

Ketiga hal tersebut yang selanjutnya akan dijadikan indikator dalam dimensi perencanaan

2.1.5 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penjabaran dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci sebelumnya. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Nurdin Usman (2002). Pelaksanaan sebagai evaluasi, pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua

rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi,

Suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

2. Resources (sumber daya),

Dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

3. Disposisi,

sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

4. Struktur Birokrasi,

Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan memiliki peran vital dalam menunjang kesuksesan atau keefektifan program. Kemudian sesuai dengan penelitian yang berjudul *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”* Oleh Iga Rosalina, tentang Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (2013) ada beberapa indikator yang dapat di jadikan referensi yaitu:

1. Kemudahan akses

Kemudahan akses yang dimaksudkan adalah bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan program SPP, apakah ada kemudahan

yang diberikan oleh pihak pengelola dalam pengajuan pinjaman dana bergulir tersebut.

2. Ketepatan waktu

Yang dimaksudkan adalah jeda waktu yang diperlukan dari proses verifikasi sampai ke pencairan apakah memerlukan waktu yang cukup lama atau tidak.

3. Kesesuaian pengajuan dengan pinjaman yang diberikan

Jelas apa yang dimaksudkan adalah apakah jumlah pengajuan pinjaman pemanfaat SPP sesuai dengan apa yang diterima ketika pencairan atau tidak.

2.1.6 Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Fungsi-Fungsi Manajerial (*Edisi Revisi*) (2007), berpendapat bahwa Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam definisi yang diberikan Sondang P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

Seperti dikutip dalam pengertian manajemen dalam blog Techno Livestock (2012). Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil

yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam proses sebelumnya. Dengan kata lain pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Masih dalam kutipan tersebut, beberapa ahli berpendapat, salah satunya Winardi mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta berpendapat “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Kemudian menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Dari beberapa ahli tersebut dapat dijabarkan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya suatu organisasi telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusiana Maharani Dewi, N. Eva Fauziah, dan Nurdin pada (2014), Universitas Islam Bandung, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana SPP Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam Di UPK PNPM-MPd Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang” ada beberapa indikator yang dapat diambil yaitu:

1. Adanya pembinaan yang dilakukan pengelola

Yang dimaksudkan adalah adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pihak pengelola kepada pemanfaat SPP setelah di cairkan pinjamannya, berkaitan dengan kegiatan administrasi dan kelembagaan kelompok SPP

2. Adanya pendampingan oleh pengelola

Selain adanya pembinaan dari pihak pengelola juga diperlukan adanya pendampingan dalam melewati berbagai masalah yang timbul, untuk memastikan jalannya kelompok sesuai dengan tujuan awal.

3. Terdapat evaluasi pelaksanaan

Dipastikan ada proses evaluasi dalam setiap proses yang telah dilaksanakan dalam suatu program. Dalam hal ini UPK sebagai pengelola juga perlu adanya evaluasi di setiap akhir tahun program.

2.1.7 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Ikhwan Abidin Basri (2005).Kesejahteraan apabila didefinisikan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi keuuuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai serta dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kesejahteraan menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomi atau masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menurut Biro Pusat Statistik Indonesia dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Menurut *United Nation Research Institute for Social Development (URISD)*, terdapat 18 indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu :

1. Tingkat harapan hidup
2. Konsumsi protein hewani per-kapita
3. Presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah
4. Presentase anak-anak yang belajar di perguruan tinggi
5. Jumlah surat kabar
6. Jumlah telepon
7. Jumlah radio
8. Jumlah penduduk di kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih
9. Presentase laki-laki di sektor pertanian
10. Presentase tenaga kerja yang kerja di sektor listrik, gas, air kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan transportasi
11. Presentase tenaga kerja yang memperoleh gaji
12. Presentase PDB yang berasal dari industri pengolahan
13. Konsumsi energi per kapita
14. Konsumsi baja per kapita
15. Konsumsi listrik per kapita
16. Nilai per kapita perdagangan luar negeri

17. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian, dan

18. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto.

Badan Pusat Statistik menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi dasar tersebut menggambarkan empat komponen dasar kualitas hidup yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah pokok hidup masyarakat yang dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pembangunan untuk hidup layak.

Sebagai indikator penelitian dalam variabel kesejahteraan masyarakat, diambil dari perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyatakan bahwa keluarga dikatakan sejahtera apabila:

1. Dapat memenuhi kebutuhan anggotanya keluarga, baik sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama
2. Mempunyai keseimbangan penghasilan dengan jumlah keluarga
3. Dapat memenuhi kebutuhan kesehatan yang layak.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1
Hasil penelitian terdahulu

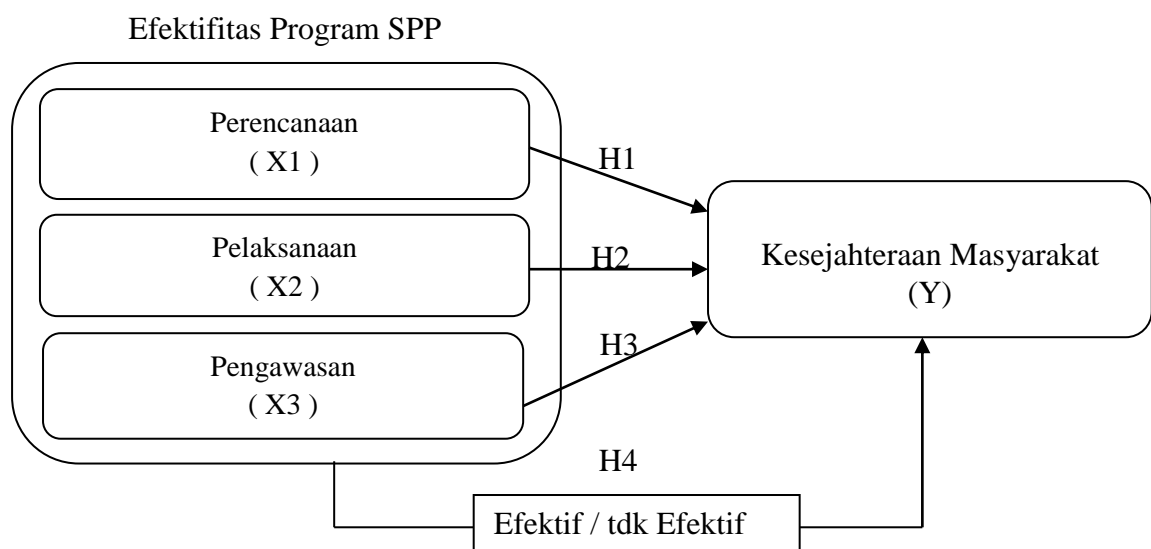
NO	Referensi Jurnal	Variabel penelitian	Hasil
1	Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Oleh : Iga Rosalina, S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2013	Perencanaan(X1), Pelaksanaan(X2), Pengawasan(X3), Kesejahteraan Masyarakat (Y).	-X1 Perencanaan efektivitasnya 63,6%, -X2 Pelaksanaan tingkat Efektivitasnya 62,3%, -X3 Pengawasan tingkat Efektivitasnya 60,8%. Ada pengaruh positif Variabel X terhadap Variabel Y
2	Efektivitas Pengelolaan Dana SPP Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam di UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kec, Jatisari Kabupaten Karawang Oleh : Rusiana Maharani Dewi, N. Henda Fauzia, & Nurdin. Universitas Islam Bandung Tahun 2014.	Perencanaan(X1), Pelaksanaan(X2), Pengawasan(X3), , Kesejahteraan Masyarakat(Y)	Ada pengaruh signifikan efektivitas pengelolaan dana SPP terhadap Kesejahteraan masyarakat dengan nilai pengaruh sebesar 6,855 dan nilai signifikansi 0,000
3	Efektivitas Program Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mar Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Buleleng Oleh : Chairunnisa, I Wayan Suwendra, Gede Putu Agus Jana Susila. Jurusan Manajemen	Pencapaian Tujuan(X1), Integritasi(X2), Adaptasi(X3), Kuantitas(X4), Dampak yang Ditimbulkan(X5), Pendapatan	- (X1)= Total Skor 88,43% Sangat Efektif - (X2)= Total Skor 90,98% Sangat Efektif - (X3)= Total Skor 89,11% Sangat Efektif

	Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Tahun 2014.	Masyarakat (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - (X4)= Total Skor 90,18% Sangat Efektif - (X5)=Total Skor 87,24% Sangat Efektif - (Y)= t-hitung 13,444 > t-tabel = 2,01
4	EfektivitasPNPM - MPd Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di desa Pakandangan brat Kec. Bluto Kab. Sumenep) Oleh : Darma Jasuli & Karman Tahun 2010	Efektivitas Program(X), Kesejahteraan Masyarakat(Y)	Terdapat korelasi positif antara Efektivitas PNPM MPd dengan kesejahteraan Masyarakat di lokasi stusi kasus, dengan nilai r sebesar 0,81

2.3 Kerangka Pikir Teoritis

Sesuai dengan penjabaran pada rumusan masalah, dapat digambarkan kerangka pikir teoritis penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka pikir Teoritis



Sumber : Kotler, Phiplip. (2009)

2.4 Perumusan Hipotesis

Rumusan hipotesis sementara yang dapat diambil dengan mengacu pada rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran teoritis adalah:

- H1. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat
- H2. Pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat
- H3. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat
- H4. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat